

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji interaksi infrastruktur masyarakat-lingkungan di MSWM (*Municipal Solid Waste Management*) dengan menganalisis preferensi warga dan WTP terhadap layanan MSWM adaptif. Studi ini menggunakan pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan mengkaji persepsi dan sikap masyarakat terhadap MSWM serta kontribusinya terhadap perbaikan infrastruktur. Untuk menganalisis interaksi manusialingkungan-infrastruktur, penelitian ini menggunakan logit parameter acak RPL(Rekognisi Pembelajaran Lampau) dan model kelas laten (LCM) untuk memperhitungkan heterogenitas individu yang tidak teramati, seperti pendapatan, usia, kondisi kehidupan, dan kesadaran akan perubahan iklim dan sistem dan infrastruktur MSWM saat ini. Model-model ini memungkinkan pemahaman bagaimana karakteristik masyarakat berinteraksi dengan preferensi mereka dan WTP untuk layanan MSWM adaptif guna mengurangi dampak lingkungan.

Permasalahan MSWM secara tidak langsung berdampak pada gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim dari perilaku manusia dalam memperlakukan dan mengelola lingkungan (Roy dkk., 2022). Oleh karena itu, diperlukan konsep adaptasi dalam menyusun kembali tindakan-tindakan untuk mengurangi bahaya atau ancaman secara umum dan tidak hanya berkaitan dengan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Perhatian masyarakat internasional dan nasional terhadap rencana adaptasi perubahan iklim semakin meningkat seiring

dengan dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia (Lee, Paavola & Dessai, 2022). Penataan ruang kota dan ancaman perubahan iklim menjadikan kota rentan (Mensah, Amponsah, Opoku, Ahadzie & Takyi, 2021) karena buruknya kualitas MSWM dan pelanggaran. Hal ini menunjukkan pentingnya adaptasi sebagai upaya strategi pengurangan bencana di perkotaan. Pada tingkat daerah, fokusnya adalah pada pengembangan kegiatan adaptasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Misalnya pengendalian aktivitas manusia dalam rangka pembangunan di Indonesia dilakukan dengan membatasi aktivitas tersebut pada wilayah yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah. Dalam penerapan kapasitas adaptif, terdapat lima dimensi yang telah ditetapkan dalam protokol IPCC, yaitu aset, fleksibilitas, organisasi sosial, pembelajaran, dan agensi (Bassett, Sharan, Suri, Advani & Giordano, 2022).

Penelitian mengenai faktor moralitas yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar retribusi sampah menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan. Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah. Retribusi sampah merupakan salah satu mekanisme penting untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor moralitas.

Moralitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi keinginan masyarakat Kota Bandung untuk membayar retribusi sampah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kebijakan dan program pengelolaan

sampah, serta meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam pembayaran retribusi, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat. Hal ini akan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Bandung.

2.2 Ekonomi Lingkungan

Dalam ketentuan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum(JDIH, 2009) Pasal 42 dan 43 mengenai perlindungan dan pengelolaan sampah hidup dengan melalui instrument ekonomi lingkungan hidup yang juga meliputi tentang perencanaan pembangunan serta kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif atau disinsentif sebagai upaya untuk melestarikan fungsi dari lingkungan hidup agar lingkungan dapat terlindungi serta dikelola dengan baik dan optimal agar dapat terhindar dari berbagai isu-isu lingkungan seperti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Ekonomi lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku maupun kegiatan manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SDAL) yang terbatas agar dapat dipertahankan pemakaiannya bahkan dapat ditingkatkan dalam jangka panjang maupun berkelanjutan. Ekonomi lingkungan membahas tentang isu-isu lingkungan, yaitu dampak yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi manusia terhadap lingkungannya. Seperti yang terdapat pada National Bureau of Economic Research pada tahun 2012 yaitu ekonomi lingkungan membahas studi teoritis maupun empiris tentang efek ekonomi dari kebijakan lingkungan nasional dan lokal di semua negara. Isu-isu tertentu termasuk biaya serta manfaat dari adanya kebijakan alternatif lingkungan dalam menangani

pencemaran udara, kerusakan kualitas air, limbah padat, zat-zat yang beracun, serta pemanasan global.

Seperti yang terkuip pada *National Bureau of Economic Research* pada tahun 2012 yaitu ekonomi lingkungan membahas studi teoritis maupun empiris tentang efek ekonomi dari kebijakan lingkungan nasional dan lokal di semua negara. Isu-isu tertentu termasuk biaya serta manfaat dari adanya kebijakan alternatif lingkungan dalam menangani pencemaran udara, kerusakan kualitas air, limbah padat, zat-zat yang beracun, serta pemanasan global. Konsep Keseimbangan Ekonomi Lingkungan:

- a. Konsep Keseimbangan Materi (*Material Balance Concept*) Konsep ini membahas tentang sudut pandang sumber daya pada lingkungannya, yaitu keseimbangan materi/bahan di alam, yang berarti setiap jenis sumber daya yang berada di lingkungan memiliki fungsi dan peranannya pada lingkungan. Jumlah dari sumber daya alam serta peranannya tersebut akan berimplikasi pada sumber daya alam lainnya di lingkungan.
- b. Konsep Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis Concept*) Konsep analisis biaya dan manfaat ialah merupakan suatu metode yang dipakai dalam menilai, apakah kegiatan dari konsumen tersebut layak atau tidak layak. Layak atau tidak layak ini didapatkan dari hasil analisis. jika biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaat yang diterima maka sudah dipastikan bahwa kegiatan tersebut tidak layak dilakukan. Konsep analisis biaya manfaat ini diterapkan dalam memnaggulangi permasalahan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan. Konsep ini diterapkan untuk

melihat nilai sistematis baik itu dari segi keuntungan maupun kerugian segala perubahan produksi dan konsumsi konsumen dalam penanggulangan pencemaran lingkungan.

c. Konsep Perlindungan Lingkungan (*Environment Protection Concept*)

Konsep perlindungan lingkungan ini merupakan konsep yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang optimal, yang artinya kualitas lingkungan tersebut baik pada sekarang maupun dimasa depan tetap terjaga kualitasnya. Konsep ini membahas tentang bagaimana agar sumber daya alam yang ada dilindungi tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dan akhirnya memberikan kerugian bagi manusia lainnya, namun dapat digunakan manusia dengan ketentuan menjaga kualitasnya sehingga pihak lain juga dapat menggunakannya.

2.3 Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang (UU) No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dibahas pada pasal 19 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan yang dapat dilakukan terdiri dari dua cara, yaitu :

- a. Pengurangan Sampah Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah yaitu dengan meminimalisasi pemakaian produk-produk yang dapat membuat sampah lebih banyak. Selanjutnya yaitu dengan daur ulang sampah yang dapat dilakukan dengan cara mengolah kembali sampah-sampah menjadi suatu produk yang berguna sehingga dapat digunakan kembali. Langkah terakhir yaitu dengan cara pemanfaatan kembali sampah

yaitu dengan cara menggunakan kembali sampah yang dapat digunakan berulang kali.

- b. Penanganan Sampah Penanganan Sampah dapat dilakukan dengan cara pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai sifat sampah ataupun jenis dan jumlahnya, pengumpulan sampah dan dipindahkan ke tempat penampungan sampah sementara, serta pengangkutan sampah dari sumber sampah maupun dari penampungan sampah sementara ke tempat Pemrosesan sampah terakhir. Pengelolaan sampah ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan dalam menjadikan sampah sebagai sumber daya Menurut (BPSDM PU, 2018) atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pengelolaan sampah cukup rumit karena prosesnya melibatkan teknologi dan aspek yang diperlukan. Teknologi dan aspek yang diperlukan dalam pengelolaan sampah ini yaitu pengendalian timbulan sampah, penanganan timbulan sampah, pengumpulan sampah dan penyimpanannya, pengolahan sampah, serta pembuangan sampah. Semua aspek tersebut harus bersinergi agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang dikeluarkan oleh kementerian pekerjaan umum terdiri dari 5 komponen yang dianggap penting dalam mempengaruhi manajemen persampahan, yaitu :

a. Peraturan atau Hukum

Manajemen persampahan membutuhkan peraturan ataupun hukum yang dapat mengatur tentang pembentukan organisasi, pemungutan retribusi sampah, ketertiban masyarakat, ketertiban umum yang mengatur terkait sampah, serta rencana induk pengelolaan sampah.

b. Kelembagaan dan Organisasi

Aspek kelembagaan dan organisasi dalam pengelolaan sampah dibuat untuk mendukung upaya agar pengelolaan sampah lebih berstruktur karena adanya Kerjasama dengan kelembagaan maupun organisasi terkait tugas-tugas yang sudah ditentukan.

c. Teknik Operasional

Teknik operasional pengelolaan sampah meliputi dasar-dasar perencanaan seperti pewadahan sampah, Teknik pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah serta pemrosesan sampah akhir.

d. Pembiayaan/retribusi

Pembiayaan/retribusi dihitung berdasarkan biaya investasi yang diberikan, biaya operasi dan pemeliharaan alat-alat pengelolaan sampah, biaya manajemen, biaya dalam pengembangan sampah, serta biaya untuk pembinaan masyarakat tentang sampah.

e. Peran serta Masyarakat

Semua program pengelolaan sampah yang sudah dibuat membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mewujudkannya dengan cara mengubah persepsi masyarakat agar lebih tertib sampah.

2.3.1 Sampah Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang (UU) No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut (Purnama, 2016) Sampah rumah tangga ialah zat-zat ataupun benda-benda sisa dari hasil kegiatan manusia sehari-hari dalam tingkat rumah tangga seperti daun-daun yang kering, sisa makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, sisa masakan dapur, dan daging. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat menghasilkan sisa (sampah) atau limbah, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan tersebut tentunya sebanding dengan tingkat konsumsi dari masyarakat akan suatu barang-barang setiap harinya (Sejati, 2009).

Hartono,(2006) mendefinisikan secara fisik bahwa sampah memiliki suatu kandungan-kandungan yang didalamnya masih berguna akan tetapi nilai yang dikandung dari sampah-sampah tersebut sudah semakin berkurang, berkurangnya nilai sampah ini dikarenakan komposisi yang dikandung sampah sudah tidak diketahui karena sudah tercampur-campur dengan sampah lainnya.

Untuk itu sampah harus dilakukan pemilahan untuk memisahkan bahan sampah agar dapat meningkatkan nilainya melalui penggunaan lebih lanjut terhadap sampah tersebut. Jenis-jenis sampah menurut Undang-Undang (UU) No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu :

a. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari masyarakat.

b. Sampah sejenis rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan masyarakat dari kawasan industri, fasilitas publik dan fasilitas lainnya.

c. Sampah spesifik adalah sampah yang mengandung racun, seperti sampahsampah yang dihasilkan dari adanya bencana alam serta sampah yang belum dikelola secara teknologi.

2.4 Barang Publik

Dalam ilmu ekonomi, (Fauzi, 2010) mendefinisikan barang publik sebagai barang yang mempunyai sifat *non-rivalry* dan *non-excludable*. Barang publik bersifat *non-rivalry* artinya ketika seseorang mengkonsumsi barang publik maka tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang yang sama. Dalam hal ini artinya tidak ada ketersaingan dalam mengkonsumsinya serta barang tidak akan habis ketika dikonsumsi (*non-divisibel*). Contoh dari barang publik *non-rivalry* ini adalah saat seseorang menghirup udara tidak membuat udara tersebut habis sehingga siapa saja dapat menghirupnya karena udara tetap tersedia.

Barang publik bersifat *non-excludable* artinya ketika seseorang mengkonsumsi barang publik tersebut, seseorang itu tidak dapat melarang orang lain mengkonsumsi barang yang sama. Contoh dari Barang publik *non-excludable* ketika seseorang menikmati pemandangan yang bagus di pantai, maka seseorang itu tidak dapat atau sulit melarang orang lain untuk menikmati pemandangan yang sama karena pemandangan merupakan barang publik yang dapat dikonsumsi siapa saja.

Secara umum barang publik dapat diartikan sebagai sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang yang apabila ketika barang publik dikonsumsi oleh

seseorang maka dia tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang publik tersebut. Di mana barang publik ialah barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa saja, dalam artian bahwa produsen dan konsumen tidak dapat menendalikan siapa saja yang berhak mengkonsumsinya.

Teori barang publik menurut para ahli dalam buku Ekonomi Publik oleh (Guritno Mangkoesobroto, 2016) :

a. Teori Pigou

Pigou teori dari barang publik adalah barang yang harus disediakan oleh pemerintahan dimana barang tersebut tersedia hingga tingkat kepuasan dari individu atas konsumsi akan barang publik tersebut sama dengan ketidakpuasan dari individu terhadap pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk penyediaan dari barang publik tersebut.

b. Teori Bowen

Dalam teori Bowen dikatakan bahwa penyediaan barang publik dapat dinikmati oleh siapa pun tanpa terkecuali.

c. Teori Lindahl

Teori Lindahl hampir sama dengan teori yang di disebutkan oleh Bowen di mana semua orang dapat menikmati barang publik tanpa terkecuali dengan adanya pembayaran konsumen berupa persentase dari total biaya atas penyediaan barang publik.

2.5 Teori Pelayanan (biaya)

Keinginan masyarakat Kota Bandung untuk membayar retribusi sampah merupakan perpaduan kompleks antara aspek rasional dan non-rasional. Salah satu faktor non-rasional yang signifikan adalah moralitas. Moralitas individu dan kolektif dapat dipandang sebagai sebuah “biaya” psikologis yang timbul ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks pembayaran retribusi sampah, moralitas dapat diartikan sebagai kesadaran akan tanggung jawab individu terhadap lingkungan dan masyarakat.

Individu yang memiliki kesadaran moral yang tinggi cenderung merasa berkewajiban untuk membayar retribusi sampah, meskipun tidak ada pengawasan langsung. Sebaliknya, individu dengan moralitas yang rendah cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dan enggan membaya retribusi sampah. Selain itu, moralitas juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jika norma sosial yang ada mendorong masyarakat untuk berperilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka kemungkinan besar masyarakat akan lebih terdorong untuk membayar retribusi sampah. Sebaliknya, jika norma sosial yang ada justru mentoleransi perilaku tidak bertanggung jawab, maka masyarakat akan cenderung enggan membayar retribusi sampah. Dengan demikian, moralitas dapat dianggap sebagai sebuah “biaya” sosial yang dapat memengaruhi pembayaran retribusi sampah.

2.5.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ditetapkan berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli

daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada UU RI No. 28 Tahun 2009 terkait dengan pajak dan retribusi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah memiliki fungsi melalui pajak yaitu sebagai pengisi kas dan sebagai pengatur. Sebagai alat anggaran pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Sedangkan fungsi kedua yaitu sebagai pengatur yang dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan dan serta stabilisasi ekonomi. Terdapat beberapa sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu seperti pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.6 Teori Ekonoomi Publik Mikro

Dalam konteks ekonomi publik mikro, pembayaran retribusi sampah di Kota Bandung dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk moralitas masyarakat. Faktor moralitas ini dapat dilihat melalui kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan kebijakan yang diimplementasikan. Jika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Pemerintah, mereka lebih cenderung untuk

membayar retribusi sampah karena melihat bahwa uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan transparan.

Sebaliknya, ketidakpercayaan masyarakat dapat menyebabkan mereka enggan membayar retribusi, terutama jika mereka merasa bahwa uang tersebut tidak digunakan secara efektif atau transparan. Selain itu, moralitas juga terkait dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan dampak negatif dari tidak membayar retribusi. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi tentang lingkungan dan kebersihan akan lebih cenderung untuk membayar retribusi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan kampanye dan edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran retribusi sampah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi.

2.7 Konsep Moralitas

Moralitas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Moralitas memberikan panduan tentang apa yang dianggap benar dan salah, dan membantu individu untuk membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Ada banyak teori moral yang berbeda, tetapi sebagian besar teori ini berfokus pada konsep-konsep seperti kewajiban, hak, keadilan, dan kebaikan.

Beberapa teori moralitas yang mungkin relevan dengan penelitian tentang faktor moralitas penentu keinginan masyarakat Kota Bandung membayar retribusi sampah adalah:

2.7.1. Teori Moralitas Utilitarianisme

Teori ini berfokus pada konsekuensi dari tindakan dan berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa individu yang memiliki moralitas tinggi mungkin lebih cenderung membayar retribusi sampah, karena mereka percaya bahwa ini adalah cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.7.2. Teori Moralitas Kantian

Teori ini berfokus pada konsep kewajiban moral dan tanggung jawab individu. Menurut (Kant, 1804) individu memiliki kewajiban moral untuk bertindak dengan cara yang menghormati hak dan martabat orang lain. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa individu yang memiliki moralitas tinggi mungkin lebih cenderung membayar retribusi sampah, karena mereka percaya bahwa ini adalah kewajiban mereka untuk berkontribusi pada kebaikan bersama.

2.7.3. Teori Moralitas Deontologi

Teori ini berfokus pada aturan dan prinsip moral dan berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah yang sesuai dengan aturan dan prinsip ini, terlepas dari konsekuensinya. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa individu yang memiliki moralitas tinggi mungkin lebih cenderung membayar retribusi sampah, karena mereka percaya bahwa ini adalah

hal yang benar untuk dilakukan, bahkan jika mereka tidak melihat manfaat langsungnya.

2.7.4. Teori Moralitas Normatif

Teori ini berfokus pada norma dan nilai sosial dan berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah yang sesuai dengan norma dan nilai ini. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa individu yang memiliki moralitas tinggi mungkin lebih cenderung membayar retribusi sampah, karena mereka percaya bahwa ini adalah hal yang diharapkan dari mereka oleh masyarakat.

2.7.5. Teori Moralitas Situasional

Teori ini berpendapat bahwa tidak ada tindakan moral yang absolut dan bahwa moralitas suatu tindakan tergantung pada konteksnya. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa individu yang memiliki moralitas tinggi mungkin tidak selalu membayar retribusi sampah, tetapi mungkin mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kemampuan mereka untuk membayar atau kualitas layanan yang mereka terima.

2.8 Pembahasan *Willingness to Pay* (WTP) dan *Ability to Pay* (ATP)

1. *Willingness to Pay* (WTP)

Kesediaan Membayar *Willingness to Pay* (WTP) merujuk pada jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan oleh individu untuk suatu barang atau jasa, dalam hal ini retribusi sampah.

Relevansi Moralitas:

Faktor moralitas dapat mempengaruhi WTP masyarakat. Masyarakat dengan kesadaran moral tinggi, baik berdasarkan etika Kantian (kewajiban moral untuk mendukung kebersihan lingkungan) maupun utilitarianisme (keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraan kolektif), cenderung memiliki WTP yang lebih tinggi. Moralitas dapat meningkatkan persepsi individu terhadap pentingnya retribusi sampah sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Penelitian Terkait :

Studi menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika dapat mempengaruhi WTP masyarakat terhadap berbagai layanan publik, termasuk pengelolaan sampah. Penelitian ini mengukur bagaimana moralitas individu berkontribusi terhadap keinginan mereka untuk membayar retribusi sampah, dengan menggunakan skala Likert untuk menilai kesadaran dan nilai moral responden.

2. *Ability to Pay* (ATP)

Kemampuan Membayar *Ability to Pay* (ATP) merujuk pada kemampuan finansial individu untuk membayar suatu jumlah tertentu, dalam hal ini retribusi sampah.

Relevansi Moralitas:

Sementara WTP berkaitan dengan keinginan berdasarkan nilai moral, ATP berkaitan dengan kemampuan ekonomi. Moralitas dapat mempengaruhi bagaimana individu memprioritaskan pengeluaran mereka. Misalnya, individu dengan pemahaman moral yang kuat mungkin akan mengalokasikan sebagian dari anggaran mereka untuk membayar retribusi sampah, meskipun mereka memiliki

ATP yang terbatas. Namun, kemampuan untuk membayar tetap merupakan faktor penting yang dapat membatasi realisasi dari niat moral tersebut.

Penelitian Terkait:

Studi tentang ATP biasanya melibatkan analisis pendapatan rumah tangga, pengeluaran, dan prioritas keuangan. Dalam konteks ini, penelitian akan mengevaluasi bagaimana faktor moralitas dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan individu untuk memastikan mereka dapat dan bersedia membayar retribusi sampah.

Pembahasan mengenai WTP dan ATP dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami peran faktor moralitas dalam mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat Kota Bandung membayar retribusi sampah. WTP menunjukkan sejauh mana masyarakat bersedia membayar berdasarkan nilai moral mereka, sementara ATP menunjukkan sejauh mana mereka mampu melakukannya secara finansial. Kedua konsep ini penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah, dengan mempertimbangkan baik nilai moral maupun kemampuan ekonomi mereka.

Dalam konteks retribusi, WTP (Willingness to Pay) dan ATP (Ability to Pay) merujuk pada dua konsep penting yang digunakan untuk menentukan sejauh mana masyarakat atau individu mampu dan bersedia membayar biaya retribusi yang dikenakan oleh pemerintah atau lembaga tertentu. WTP mengacu pada sejauh mana seseorang bersedia membayar suatu biaya atau tarif sebagai imbalan atas pelayanan atau fasilitas yang diterimanya. Ini lebih terkait dengan nilai subjektif atau persepsi penerima layanan terhadap manfaat yang mereka terima. Di sisi lain, ATP berfokus

pada sejauh mana seseorang atau kelompok memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya tersebut. ATP sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti penghasilan, kekayaan, atau keadaan finansial individu. Dalam penyusunan kebijakan retribusi, kedua konsep ini harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa tarif yang dikenakan tidak membebani masyarakat, tetapi juga adil dan sebanding dengan pelayanan yang diberikan, serta sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut.

2.8.1 *Willingness to Pay (WTP)*

Teori Willingness to Pay (WTP) dalam konteks retribusi sampah merujuk pada sejauh mana individu atau rumah tangga bersedia membayar untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. WTP sering digunakan untuk mengukur nilai yang dirasakan masyarakat terhadap suatu layanan publik, dalam hal ini adalah pengelolaan sampah. Secara aktual, WTP berkaitan erat dengan faktor-faktor seperti kesadaran lingkungan, tingkat kenyamanan dengan layanan yang diberikan, serta manfaat yang dirasakan dari pengelolaan sampah yang baik. Masyarakat yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan, seperti pencemaran dan perubahan iklim, cenderung menunjukkan WTP yang lebih tinggi untuk mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, WTP juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi biasanya lebih bersedia membayar biaya retribusi sampah yang lebih besar. Di sisi lain, pemerintah perlu memperhatikan aspek sosial-ekonomi dalam menentukan tarif retribusi, agar tarif

tersebut tetap adil dan tidak membebani masyarakat dengan penghasilan rendah. Implementasi WTP dalam retribusi sampah juga dapat mencakup pendekatan diferensiasi tarif berdasarkan jenis layanan dan tingkat kebersihan yang diinginkan, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang WTP sangat penting untuk merancang kebijakan retribusi sampah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

2.8.2 *Ability to Pay* (ATP)

Dalam konteks retribusi sampah, masalah terkait ability to pay (kemampuan untuk membayar) sering kali menjadi tantangan besar, terutama bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Kemampuan untuk membayar ini mencerminkan seberapa besar daya beli masyarakat terhadap biaya retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah atau penyedia layanan sampah. Di banyak daerah, tarif retribusi sampah yang terlalu tinggi dapat membebani kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk membayar dan, pada gilirannya, menurunkan partisipasi mereka dalam program pengelolaan sampah yang telah dirancang. Hal ini bisa menyebabkan masalah sosial, seperti pengelolaan sampah yang buruk, karena masyarakat yang tidak membayar retribusi seringkali tidak mendapatkan layanan pengangkutan atau pembuangan sampah yang memadai, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, ketidakmampuan untuk membayar juga dapat memicu ketidaksetaraan dalam kualitas layanan antara kelompok masyarakat yang lebih mampu dan yang kurang mampu. Oleh karena itu,

pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis kemampuan untuk membayar saat merancang tarif retribusi sampah, misalnya dengan menerapkan subsidi untuk kelompok berpendapatan rendah atau menggunakan sistem tarif progresif yang mengakomodasi perbedaan daya beli di masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah yang inklusif dan adil.

2.9 Strategi Peningkatan Restribusi Sampah

Strategi Peningkatan Retribusi Sampah di Kota Bandung Berdasarkan Faktor Moralitas.

1. Edukasi dan Kesadaran Moral

Kampanye Publik: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan lingkungan melalui kampanye media sosial, seminar, dan lokakarya.

Pendidikan Sekolah: Mengintegrasikan pendidikan moral dan lingkungan dalam kurikulum sekolah untuk membentuk kesadaran sejak dini.

2. Insentif dan Penghargaan

Penghargaan Komunitas: Memberikan penghargaan kepada komunitas atau individu yang berkontribusi signifikan dalam pembayaran retribusi sampah.

Insentif Keuangan: Menyediakan diskon atau insentif finansial bagi mereka yang rutin membayar retribusi sampah tepat waktu.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan Keuangan Publik: Memastikan transparansi dalam penggunaan dana retribusi sampah melalui laporan publik yang rutin. *Feedback* Masyarakat:

Membuka saluran komunikasi untuk umpan balik dari masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan retribusi.

4. Penerapan Hukum dan Regulasi

Penegakan Hukum: Menegakkan regulasi pembayaran retribusi sampah dengan sanksi bagi yang tidak patuh.

Kerjasama dengan Pemerintah Lokal: Memperkuat kerjasama antara pemerintah lokal dan komunitas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan retribusi sampah.

5. Teknologi dan Inovasi

Aplikasi Pembayaran: Mengembangkan aplikasi yang memudahkan pembayaran retribusi sampah secara online.

Sistem Monitoring: Menggunakan teknologi untuk memonitor pembayaran dan pengelolaan sampah secara efisien.

Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sampah akan meningkat, sehingga membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Bandung.

2.10 Teori Pendapatan

Teori pendapatan merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pendapatan individu atau rumah tangga seringkali berhubungan langsung dengan kemampuan dan keinginan mereka untuk membayar berbagai jenis pajak dan retribusi, termasuk retribusi sampah.

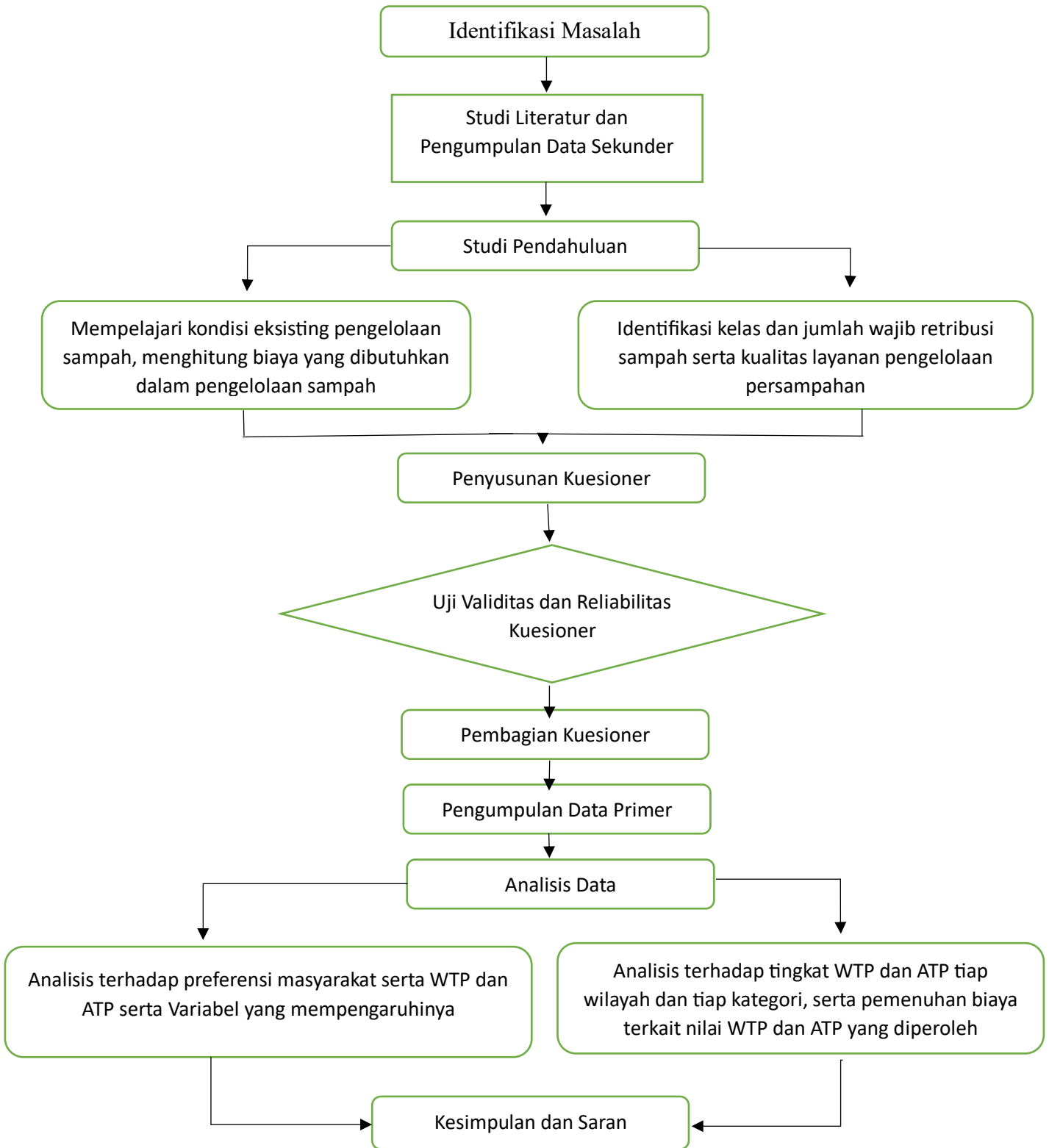
1. Pendapatan sebagai Faktor Ekonomi :

Pendapatan mempengaruhi daya beli dan alokasi anggaran rumah tangga. Masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki alokasi anggaran yang lebih fleksibel untuk pembayaran retribusi sampah dibandingkan mereka yang berpendapatan rendah. Hal ini menandakan bahwa keinginan untuk membayar retribusi sampah dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan.

2. Implikasi Kebijakan

Pemerintah Kota Bandung dapat mempertimbangkan faktor pendapatan dalam menetapkan kebijakan retribusi sampah. Misalnya, memberikan subsidi atau skema pembayaran yang fleksibel untuk rumah tangga berpendapatan rendah dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi dalam membayar retribusi sampah. Selain itu, kampanye kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya kebersihan lingkungan perlu terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lintas kelompok pendapatan.

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran



2.11 Hipotesis

Hipotesis merupakan salah satu dugaan atau jawaban sementara terkait dengan permasalahan yang penulis kaji yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini yaitu sejauh mana Masyarakat Kota Bandung memiliki keinginan yang beragam dalam membayar retribusi sampah, namun hipotesis ini menunjukkan bahwa faktor moralitas merupakan salah satu penentu utama dalam memengaruhi keinginan tersebut. Masyarakat yang memiliki kesadaran moralitas tinggi, yaitu kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap peraturan, akan lebih cenderung membayar retribusi sampah.

Kesadaran moralitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peniruan perilaku yang baik dari orang tua dan komunitas, serta pengaruh lingkungan sekitar. Masyarakat yang tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan nilai-nilai moral akan lebih mungkin memiliki keinginan untuk membayar retribusi sampah. Selain itu, persepsi tentang tanggung jawab sosial juga memainkan peran penting. Masyarakat yang melihat pembayaran retribusi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka akan lebih cenderung untuk melakukannya.

Hipotesis ini dapat diuji melalui survei dan wawancara dengan masyarakat Kota Bandung. Dengan menganalisis data dari survei tersebut, dapat diketahui hubungan antara kesadaran moralitas, kepatuhan terhadap peraturan, dan persepsi tanggung jawab sosial dengan keinginan membayar retribusi sampah. Dengan demikian hipotesis ini dapat membantu memahami lebih dalam mengapa masyarakat Kota Bandung memiliki tingkat keinginan membayar

retribusi sampah yang beragam dan bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar retribusi sampah.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa faktor moralitas memiliki pengaruh signifikan terhadap keinginan masyarakat Kota Bandung untuk membayar retribusi sampah. Semakin tinggi kesadaran sosial masyarakat mengenai dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, semakin besar kemungkinan mereka untuk merasa bertanggung jawab secara moral dalam membayar retribusi tersebut.

Selain itu, norma dan nilai budaya yang mendukung kepentingan kolektif, seperti gotong royong, juga berperan dalam meningkatkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajiban ini. Kepercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana retribusi dan pengaruh lingkungan sosial, seperti keluarga dan teman, turut mempengaruhi sikap masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor moralitas tersebut berkontribusi secara positif terhadap keinginan masyarakat untuk membayar retribusi sampah di Kota Bandung.

2.13 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuli Arnita dan Nur Aidar (2018). “Analisis <i>Willingness to Pay</i> Masyarakat untuk Peningkatan Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh”.	Pendapatan, Pendidikan, Usia	<i>Contigen Valuation Method (CVM)</i> dan Regresi linier Berganda.	Besaran rata-rata yang bersedia dibayarkan masyarakat Banda Aceh yaitu sebesar Rp 17.067/bulan untuk peningkatan pengelolaan sampah. Variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap WTP, sedangkan variabel Pendidikan, pekerjaan, usia berpengaruh positif tetapi tidak signifikan (Arnita & Aidar, 2018)
2.	Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, dan Ventje Kasenda (2019). “Implementasi Kebijakan di Kota Bandung dengan Metodologi Kualitatif”.	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah, kesadaran masyarakat, dan efektivitas pengelolaan sampah.	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung telah berjalan dengan baik, tetapi masih mengalami kendala karena kesadaran masyarakat untuk memahami setiap aturan dalam kebijakan pengelolaan sampah.

	Nama Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Rian Anggara, (2018). “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesiediaan Membayar Restribusi Sampah pada Masyarakat Kota Bandung”.	Kesiediaan membayar Restribusi Sampah, Kesadaran Lingkungan, Kepercayaan terhadap Pemerintah, Kualitas layanan persampahan dan Faktor Ekonomi.	Kuantitatif, dengan survey terhadap 384 respomden.	Hasil dari penelitian adalah keterikatan komunitas berpengaruh positif terhadap kesiediaan membayar restribusi sampah. Kpercayaan terhadap pemerintah, dan kesadaran lingkungan tidsak berpengaruh signifikan terhadap kesiediaan membayar restribusi sampah. Faktor ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesiediaan membayar restrbusi sampah.
4.	Muhammad Faathir Alhakam dan Iwan Juwana. . (2019). “ <i>Analisis Willingness to Pay</i> Masyarakat Kelurahan Antapani Tengah Menuju Optimalisasi TPS3R”.	Jenis Kelamin, usia, pendapatan, tingkat Pendidikan, pekerjaan, jumlah orang, restribusi sampah.	<i>Contigen Valuation Method (CVM)</i> dan Regresi linier Berganda.	Besaran WTP yang bersedia dibayarkan sebesar Rp 16.079/bulan dan rata-ratanya sebesar Rp 7.163/bulan. Hasil yang didapatkan menunjukkan variabel tingkat Pendidikan dan biaya retribusi sampah berpengaruh dan signifikan, sedangkan variabel lainnya seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan dan jumlah orang berpengaruh dan tidak signifikan (Alhakam & Juwana, 2019).

	Nama Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Kofi Sekyere Boateng, Peter AgyeiBaffour, Daniel Boateng, George Nana Kwasi Rockson, Kofi Akohene Mensah, dan Anthony Kwaku Edusei. (2019). <i>“Household Willingnessto-Pay for Improved Solid Waste Management Services in Four Major Metropolitan Cities in Ghana”</i> .	Jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, kepuasan terhadap pembersihan sampah, dan harga maksimum sampah.	<i>Contigen Valuation Method (CVM)</i> dan Regresi logit dan probit.	Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa responden rumah tangga bersedia membayar Rs 24 (US\$ 0,34) untuk lingkungan yang bersih di daerah semi-perkotaan. Studi ini juga menemukan lebih dari 95% responden rumah tangga bersedia membayar untuk pengelolaan sampah di Madurai. hasil logit untuk variabel-variabel yang secara signifikan berhubungan dengan probabilitas memberikan nilai WTP positif. Sedangkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, sistem pengelolaan sampah saat ini tidak terpenuhi, dan usia, tingkat pendidikan dan kesediaan membayar maksimum negatif (Balasubramanian, 2019).
6.	Selamawit Mulat, Walelegn Worku, dan Amare Minyihun,(2019).	jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, pendidikan, jumlah sampah yang	<i>Contigen Valuation Method (CVM)</i> .	Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa 81,06% bersedia membayar untuk layanan tersebut. Jumlah rata-rata uang yang bersedia dibayarkan oleh peserta per bulan adalah 29,7

	Nama Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>“Willingness to pay for improved solid waste management and associated factors among households in Injibara town, Northwest Ethiopi”.</i>	dihasilkan, status perkawinan, agama, jumlah anggota keluarga, jarak ke tempat pembuangan sampah, kepuasan terhadap pelayanan, status keadaan		ETB (\$ 1,07)). Penelitian mengungkapkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh dan signifikan secara statistik terhadap kesediaan membayar (Mulat et al., 2019).
7.	Richardson Kojo Edeme dan Chogozie Nelson Nkalu.(2020). <i>“Household preferences and willingness to pay for waste management service in Nsukka Urban Area”.</i>	Usia, Jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, pendidikan, permintaan akan pengelolaan sampah, pendapatan, status kepemilikan rumah, biaya pengelolaan sampah, permintaan akan jasa	<i>Ordinary last square</i> (OLS), dengan model regresi probit.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor demografi seperti usia, ukuran rumah tangga dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemauan rumah tangga untuk menuntut pengelolaan sampah di wilayah perkotaan Nsukka. Jenis kelamin. Pendidikan, jumlah anggota keluarga berpengaruh positif. Umur dan status perkawinan berpengaruh negatif (Edeme & Nkalu, 2020).

	Nama Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		pengelolaan sampah dan kesadaran tentang implikasi lingkungan dari pelayanan pengelolaan sampah.		
8.	Muniyandi Balasubramanian,(2019). <i>“Household Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management Services: Using Contingent Valuation Analysis in India”</i> .	Jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, kepuasan terhadap pembersihan sampah, dan harga maksimum sampah.	<i>Contigent Valuation Method</i> (CVM), model regresi logit dan probit.	Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa responden rumah tangga bersedia membayar Rs 24 (US\$ 0,34) untuk lingkungan yang bersih di daerah semi-perkotaan. Studi ini juga menemukan lebih dari 95% responden rumah tangga bersedia membayar untuk pengelolaan sampah di Madurai. hasil logit untuk variabel-variabel yang secara signifikan berhubungan dengan probabilitas memberikan nilai WTP positif. Sedangkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, sistem pengelolaan sampah saat ini tidak terpenuhi, dan usia, tingkat pendidikan dan kesediaan membayar maksimum negatif.
9.	Lukman Hakim, (2020).	tingkat pendidikan, pendapatan bulanan,	model regresi dan model <i>Collective Ac-tion</i> (CA).	Hasil penelitian menunjukkan masyarakat bersepakat membayar Rp 2.000/minggu. Tingkat partisipasi

	Nama Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	“Penanganan Sampah Secara Partisipatif di Desa Salut Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat”.	retribusi sampah, manfaat yang dirasakan.		masyarakat dalam penanganan sampah sebesar 60.5%. faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar masyarakat yaitu manfaat yang dirasakan oleh warga (Hakim, 2020).
10.	Grcae Dharmawati Timang dan Ihwan Tjoli, Ludia T. Wambrau. (2019). “Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kesediaan membayar (<i>willingness to pay</i>) dalam pelayanan pengelolaan sampah di Distrik Manokwari Barat”.	persepsi responden terhadap pengelolaan sampah, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendapatan, tingkat Pendidikan.	<i>Contigen Valuation Method</i> (CVM) dan Regresi linier berganda.	Besaran rata-rata WTP adalah sebesar Rp. 68.333. pengaruh secara simultan maupun pasrial menunjukkan semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kesediaan membayar masyarakat (Timang & Tjoli, 2019).

	Nama Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
11.	Nurul Huda (2018). “Pengaruh Kesadaran Lingkungan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Retribusi Sampah di Kota Bandung”.	Tingkat pendidikan, pendapatan bulanan, usia, kesadaran tentang implikasi lingkungan dari pelayanan pengelolaan sampah.	Kuantitatif, dengan survey terhadap 3126 responden.	Kesadaran lingkungan yang tinggi di kalangan warga Bandung secara signifikan mempengaruhi keinginan mereka membayar retribusi sampah. Warga yang memiliki kesadaran lingkungan cenderung merasa berkewajiban secara moral untuk mendukung kebijakan pengelolaan sampah melalui pembayaran retribusi.
12.	Muhammad Ibrahim Sahupala, (2019). “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya”.	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah, komunikasi dengan masyarakat, koordinasi dengan instansi lain, pengawasan dan fasilitas sarana prasarana.	Penelitian Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan dengan komunikasi terbuka dengan masyarakat, koordinasi dengan instansi lain, pengawasan dan fasilitas sarana prasana yang cukup untuk mengelola sampah.